

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP
	1.2	Nama paket pekerjaan: Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor – Atap Tritisan Lantai 1,2 dan 3
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor – Atap Tritisan Lantai 1,2 dan 3
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Pengadaan Langsung
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: JL. Menteri Supeno 1/2 Semarang
	1.9	Website Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: http://www.diskominfo.jatengprov.go.id
	1.10	Website SPSE:..... [contoh: <i>lpse.lkpp.go.id</i>]
C. Sumber Pendanaan	2	<p>1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor: 01040/DPA/2024, tanggal 29 Desember 2024 dengan kode rekening Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : 1.09.0009.5.1.2.3.3.1.01.03</p> <p>2. Pagu Anggaran: Rp. 200.000.000,-</p> <p>3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 199.810.000,-</p>
D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha	5	<p>Persyaratan Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi: c. Subklasifikasi : 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [Valid/Tidak Valid]. 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

		<p>6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);</p> <p>7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.</p>																
E. Masa Berlaku Penawaran	7.3.a.2) 10.2.a.3)	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender																
F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7.2.a.3) 10.2.a.4)	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 60 (enam puluh) hari kalender																
G. Persyaratan Teknis	10.3.e.1)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>dst</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Status Kepemilikan :</i></p> <p>(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice);</p> <p>(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);</p> <p>(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.</p>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	_____	_____	_____	2	_____	_____	_____	dst	_____	_____	_____
	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah														
1	_____	_____	_____															
2	_____	_____	_____															
dst	_____	_____	_____															
10.3.e.2)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Pengalaman</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>dst</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi</i></p>	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	_____	_____	_____	2	_____	_____	_____	dst	_____	_____	_____	
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja															
1	_____	_____	_____															
2	_____	_____	_____															
dst	_____	_____	_____															